



## MANUAL INDIKATOR SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

PERIODE PENILAIAN : 2024

<b>RENCANA HASIL KERJA</b>	Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah Lainnya dengan kualitas pelayanan prima
<b>UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA</b>	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya
<b>TUJUAN</b>	Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah lainnya dengan kualitas pelayanan yang prima
<b>DESKRIPSI</b>	<b>Definisi</b>
	Peningkatan penerimaan pajak daerah lainnya yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan target penerimaan pajak daerah lainnya dengan satuan persentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan
	<b>Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)</b>
	$pj = (n - (n \text{ dasar}) / (n \text{ dasar})) \times 100\%$ <p> <math>pj</math> = Peningkatan penerimaan Pajak Daerah Lainnya ; <math>n</math> = Jumlah realisasi penerimaan Pajak Daerah Lainnya tahun berjalan ; <math>n \text{ dasar}</math> = Jumlah realisasi penerimaan Pajak Daerah Lainnya tahun 2021         </p>
<b>SATUAN PENGUKURAN</b> (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)	
<b>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI</b>	Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	Laporan Realisasi Penerimaan SIKSDA
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	pertahun

<b>RENCANA HASIL KERJA</b>	Meningkatnya kualitas tata kelola OPD yang baik
<b>UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA</b>	Nilai SAKIP
<b>TUJUAN</b>	1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2. menilai tingkat implementasi SAKIP; 3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan 4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
<b>DESKRIPSI</b>	<b>Definisi</b>
	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam . Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
	<b>Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)</b>
	100% Dari Hasil penilaian = 30% dari Perencanaan Kinerja + 25% Pengukuran Kinerja + 15% Pelaporan Kinerja + 10 % Evaluasi Internal + 20% Capaian Kinerja
<b>SATUAN PENGUKURAN</b> (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)	
<b>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI</b>	Outcome

<b>SUMBER DATA</b>	LHE Penilaian SAKIP dari Tim Penilai SAKIP Daerah / Inspektorat
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	pertahun

<b>RENCANA HASIL KERJA</b>	Meningkatnya kualitas tata kelola OPD yang baik
<b>UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA</b>	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
<b>TUJUAN</b>	Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai acuan tingkat pencapaian kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat atas penetapan kebijakan, penataan sistem, mekanisme dan prosedur sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan.
<b>DESKRIPSI</b>	<b>Definisi</b>
	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik
	<b>Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)</b>
	Sesuai dengan Lampiran II Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
<b>SATUAN PENGUKURAN (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)</b>	
<b>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI</b>	Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dikeluarkan melalui sistem Aplikasi layanan survei dari Bagian Organisasi
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	perenambulan

<b>RENCANA HASIL KERJA</b>	Meningkatnya kualitas tata kelola OPD yang baik
<b>UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA</b>	Nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik)
<b>TUJUAN</b>	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah kabupaten sidoarjo berdasarkan 6 aspek kebijakan pelayanan, profesional SDM, sarana Prasarana, sistem informasi pelayanan publik, Konsultasi dan pengaduan, inovasi pelayanan
<b>DESKRIPSI</b>	<b>Definisi</b>
	Sesuai Permenpan RB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
	<b>Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)</b>
	Sesuai Permenpan RB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
<b>SATUAN PENGUKURAN (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)</b>	
<b>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI</b>	Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	Hasil penilaian terhadap 6 aspek baik secara survei dan penilaian langsung oleh Sekretariat Daerah
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	pertahun

<b>RENCANA HASIL KERJA</b>	Meningkatnya penerimaan Pajak BPHTB dengan kualitas pelayanan prima
<b>UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA</b>	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB

<b>TUJUAN</b>	Untuk meningkatkan penerimaan pajak BPHTB dengan kualitas pelayanan yang prima
<b>DESKRIPSI</b>	<b>Definisi</b>
	Peningkatan penerimaan pajak BPHTB yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak BPHTB dengan satuan persentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan
	<b>Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)</b>
	$pj = (n - (n \text{ dasar}) / (n \text{ dasar})) \times 100\%$ <p>pj = Peningkatan penerimaan pajak BPHTB  n = Jumlah realisasi penerimaan pajak BPHTB tahun berjalan ;  n dasar = Jumlah realisasi penerimaan pajak BPHTB tahun 2021</p>
<b>SATUAN PENGUKURAN</b> (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)	
<b>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI</b>	Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	Laporan Realisasi Penerimaan SIKSDA
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	pertahun

<b>RENCANA HASIL KERJA</b>	Meningkatnya penerimaan PBB-P2 dengan kualitas pelayanan prima
<b>UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA</b>	Prosentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2
<b>TUJUAN</b>	Untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 dengan kualitas pelayanan prima
<b>DESKRIPSI</b>	<b>Definisi</b>
	Peningkatan penerimaan PBB P2 yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan PBB P2 dengan satuan persentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan
	<b>Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)</b>
	$pj = (n - (n \text{ dasar}) / (n \text{ dasar})) \times 100\%$ <p>pj = Peningkatan penerimaan PBB P2 ;  n = Jumlah realisasi penerimaan PBB P2 tahun berjalan ;  n dasar = Jumlah realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2021</p>
<b>SATUAN PENGUKURAN</b> (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)	
<b>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI</b>	Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	Laporan Realisasi Penerimaan SIKSDA
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	pertahun

<b>RENCANA HASIL KERJA</b>	Terlaksana peningkatan profesionalitas ASN
<b>UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA</b>	Jumlah JP yang diikuti dalam peningkatan kompetensi
<b>TUJUAN</b>	Untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, webinar, dll
<b>DESKRIPSI</b>	<b>Definisi</b>
	Peningkatan kompetensi dengan mengikuti pelatihan, webinar, dll
	<b>Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)</b>
	Jumlah JP yang diikuti dalam peningkatan kompetensi selama 1 tahun
<b>SATUAN PENGUKURAN</b> (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)	
<b>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI</b>	Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	Sertifikat dan pelaporan

**PERIODE PELAPORAN**

pertahun